

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses dalam menambahkan atau melakukan perubahan dalam menjawab permasalahan sekitar. Peranan pembangunan dalam pemerintahan menjadi hal yang diutamakan dikarenakan peranannya menjadi instrumen pemerintah dalam menentukan arah jalan tujuan negara. Dengan begitu pengoptimalan pembangunan di masing-masing pemerintahan sebagai pemegang kewenangan perlu direncanakan dengan matang yang memperhatikan permasalahan yang ada serta realisasi perencanaan tersebut (Soares et al., 2015). Berdasarkan UUD 1945 pembangunan nasional bertujuan untuk kemajuan serta kesejahteraan bangsa, sesuai dengan penjelasan di alinea keempat menjelaskan pada dasarnya pembangunan nasional yaitu untuk *“meningkatkan kecerdasan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, melakukan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian”* (Sugianto, 2019). Selain itu orientasi pembangunan perlu mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjamin kebutuhan masa sekarang serta mempertimbangkan kebutuhan generasi masa mendatang (UNESCO, 2011, P.1) dalam (Widjajanti, Darwina Matakupan, Stien j, Didha, Robert J, Martan, Dwi, & Hidayat, 2014). Konsep Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan oleh Komisi Bruntland yang dipimpin Perdana Menteri Norwegia (Gro Harlem Brundtland) melalui buku *“Our Common Future”* yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development (WECD)* pada tahun 1987 (Suparmoko, 2020). Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar prinsip yaitu kesejahteraan ekonomi, sosial, dan berkelanjutan lingkungan. Pembangunan yang mengimplementasikan ketiga pilar tersebut menciptakan pembangunan yang inklusif dan dapat menjamin keberlanjutan untuk kebutuhan masa sekarang dan generasi di masa mendatang. Oleh karena itu pembangunan keberlanjutan perlu diadopsi dalam sebuah pembangunan termasuk pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara.

Fenomena pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dilakukan oleh berbagai Negara dengan berbagai latar belakang permasalahan yang dihadapi, seperti negara Brasil, Brasil merupakan salah satu negara yang melakukan pemindahan Ibu Kota dari Rio Jeneiro ke Brasilia disebabkan kepadatan penduduk; selanjutnya yaitu Negara Korea Selatan, alasan yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota dari Seoul ke Sejong adalah kepadatan penduduk serta guna untuk percepatan pembangunan di Korea Selatan; Selanjutnya peristiwa pemindahan Ibu kota yaitu disebabkan dalam bidang ekonomi yaitu terjadi di Nanjing oleh Shanghai; terakhir yaitu peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara yang diakibatkan karena penurunan suatu dinasti atau budaya yaitu terjadi pada di Babilon dan Cahokia (H.M. Yahya, 2018). Termasuk di Indonesia Peristiwa Pemindahan Ibu Kota telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019. Di zaman Indonesia sendiri pemindahan kekuasaan atau perpindahan pusat pemerintahan merupakan hal yang lumrah dan sering terjadi seperti yang terjadi kerajaan Majapahit yang mempunyai jejak situs Trowulan di mana di anggap sebagai pusat pemerintahannya, yaitu contoh selanjutnya adalah kerajaan Mataram dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya.

Di Indonesia sendiri, sejarah pemindahan Ibu Kota telah dilakukan oleh beberapa presiden sebelum Presiden Jokowi, pada Januari 1946 sampai Desember 1949 dilakukan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Yogyakarta karena situasi dalam keadaan perang kemerdekaan. Kemudian dari Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat juga pernah menjadi Ibu Kota pada saat Presiden Soekarno melakukan pembentukan pemerintah darurat sebelum tertangkap oleh Belanda sekitar bulan Desember 1948 dan Juni 1949. Serta Bireuen, Provinsi Aceh juga sempat menjadi Ibu Kota Negara dengan rentan waktu seminggu, sebelum di pindahkan lagi ke Jakarta dalam menanti Proklamasi Kemerdekaan NKRI. Selain itu wacana pemindahan Ibu Kota Negara juga sempat diusulkan oleh para pemimpin Indonesia dimulai dari tahun kepimpinan Presiden Soekarno, usulan Presiden Proklamator tersebut mengusulkan kota Palangkaraya sebagai Ibu Kota Indonesia pada tahun 1957, kemudian dilanjut lagi oleh Presiden Soeharto yang membentuk Keppres nomor 1 tahun 1997 mengenai "*Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol*" yang dimaksudkan awalnya untuk pusat Pemerintahan, kemudian pada tahun 2013

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengusulkan tentang mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota melainkan dengan tata kota yang perencanaan dan pembangunannya didesain sistematis dan terstruktur atau pemindahan pusat pemerintahan dipindahkan di luar lokasi dari Jakarta. (Kementerian PPN/Bappenas, 2021a).

Pemindahan Ibu kota Negara sangat mungkin dilakukan, regulasi spesifik mengenai tentang Ibu Kota Negara tidak diatur secara tegas pada konstitusi namun di dalam UU. Disebutkan pada sisi konstitusi, kosa kata Ibu Kota Negara hanya disebutkan dua kali yaitu pada Bab II (Kedua) di pasal dua tentang "*Majelis Permusyawaratan Rakyat*" yang berbunyi, "*Majelis permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara*". Serta di Bab VIII A mengenai "*Badan Pemeriksa Keuangan*" pada pasal 23 G menyatakan bahwa "*Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi*". Berdasarkan pernyataan tersebut dapat didefinisikan bahwa pemindahan Ibu kota memiliki unsur fleksibel dengan catatan memiliki alasan yang kuat serta dalam keadaan-keadaan yang mengharuskan hal tersebut dilakukan. (Hadi & Ristawati, 2020).

Kebijakan pemindahan Pembangunan Ibu Kota Negara merupakan suatu kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah yang diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pertumbuhan pembangunan di Indonesia termasuk pada isu lingkungan. Pemindahan Ibu Kota Nusantara sendiri tertuang pada UU nomor 3 tahun 2022, keputusan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengoptimalkan sumber daya negara dan merespons kebutuhan infrastruktur, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan negara.

Belajar dari beberapa negara yang telah melakukan pemindahan Ibu Kota Negara yang ada di Asia termasuk misalnya Malaysia. Pemindahan ibu kota negara Malaysia dilakukan sejak 1999, Malaysia memiliki dua ibu kota: Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia sejak negara itu meraih kedaulatan politiknya dari Inggris tahun 1957. Kuala Lumpur menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis yang sangat sibuk. Seperti halnya Jakarta dan ibu kota-ibu kota negara lainnya, saat itu beban Kuala Lumpur yang menyanggah banyak predikat: pusat pemerintahan, pusat jasa, perdagangan

dan bandul perekonomian serta impian kaum urban, cukup berat. Fenomena klasik kota metropolitan seperti macet, polusi udara, masalah kependudukan, permukiman dan lingkungan, banjir, juga terjadi di Kuala Lumpur. Namun, sejak 1999, pusat administrasi pemerintahan direlokasi dari Kuala Lumpur ke sebuah kawasan yang berjarak sekitar 25 km di selatan kota yakni Putrajaya. Konsep pembangunan Putrajaya dinilai sesuai dengan pembangunan berkelanjutan dengan memiliki manajemen yang baik terhadap tiga aspek pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan yang memiliki konsep “*city garden*” dan “*made-in-Malaysia*” (Sumarno, 2020) menjadi salah satu contoh untuk menopang Malaysia sebagai kota pedoman untuk pembangunan yang ramah sosial dan lingkungan. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan pemerintah Indonesia dalam melakukan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Melihat pembangunan harus berorientasi pada penjaminan pada masa mendatang sesuai dengan yang tertuang pada pembangunan berkelanjutan, sehingga salah satu aspek yang harus terlihat dari pembangunan IKN yaitu aspek keberlanjutan dari tiga poin utama yaitu ekonomi, sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Pemindahan ibu kota negara yang berlokasi di Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan berdasarkan dengan beberapa pertimbangan kriteria yang ada di Kalimantan Timur. Adapun kriteria terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara yaitu sebagai berikut: tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia yang mempresentasikan keadilan, potensi konflik sosial rendah, daya dukung tanah dan air baku, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, minim bencana alam, dan dekat dengan kota berkembang sebagai efisiensi investasi awal infrastruktur ditambah diyakini Pulau Kalimantan dapat memperluas kontribusi kesempatan bagi daerah di luar Pulau Jawa untuk ikut andil dalam perkembangan dan kontribusi di aspek pemerataan pembangunan, dan meringankan beban yang diemban DKI Jakarta sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional. selain itu DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang rawan dengan bencana dan dinilai tidak layak huni, berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau dari BPS di tahun 2022 menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi yang kedua dari belakang setelah Provinsi Papua, dengan persentase 36,23%

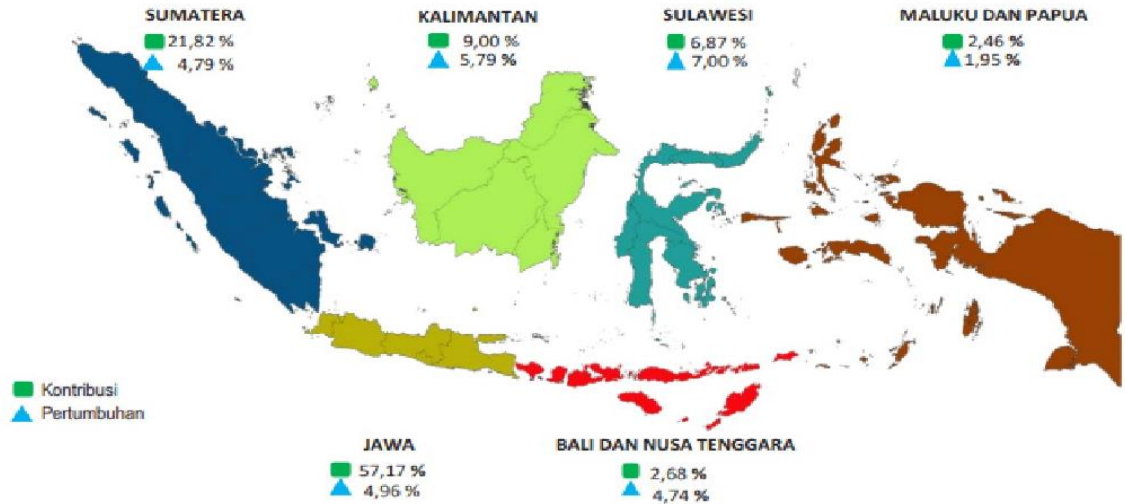
(Badan Pusat Statistik, 2022a) alasan lain yang melatar belakangi pemindahan ibu kota negara dari kajian dokumen Bappenas yaitu antara lain (Kementerian PPN/Bappenas, 2021a):

1. *Terkonsentrasinya penduduk Indonesia di Pulau Jawa yang berkisar 57%;*
2. *Terjadi ketimpangan kontribusi ekonomi yang berpusat di Pulau Jawa dengan angka 59% terhadap Pendapatan Domestik Boruto (PDB) Nasional;*
3. *Krisis penyediaan air di Pulau Jawa khususnya daerah DKI Jakarta dan Jawa Timur;*
4. *Pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi di DKI Jakarta; dan*
5. *Penurunan daya dukung lingkungan, ancaman bahaya banjir, gempa bumi dan tanah turun di DKI Jakarta.*

Pemindahan Ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan bentuk salah satu strategi dari semangat pemerintah dalam pemerataan pembangunan termasuk dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur dan Perekonomian. Selain dari pada itu bentuk pemerintah dalam mengikis istilah *Jawasentris*. Dengan aura Ibu Kota yang begitu megah dan modern memiliki karakter tersendiri dari masyarakat Indonesia sehingga menjadikan Ibu Kota sebagai sandaran perekonomian dalam kehidupannya. Pembangunan yang terkesan berpusat pada Pulau Jawa dimaknai oleh kelompok yang kontra sebagai sikap Indonesia dan para elit berlebihan terhadap Pulau Jawa. Pola pembangunan yang bersifat *Jawasentris* berdampak pada pemerataan pembangunan, SDM dan tentu Perekonomian (Mohammad, 2017).

Dari data yang ada, terlihat bahwa terjadi kesenjangan antara pertumbuhan di Pulau Jawa dengan daerah lain di Indonesia. berdasarkan data yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (berita resmi statistik No. 34/05/Th.XXVI, 5 Mei 2023) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2023 menyebutkan bahwa Provinsi-provinsi di pulau Jawa tercatat mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian disusul oleh Pulau Sumatera memiliki angka 21,82% (persen), selanjutnya Pulau Kalimantan dengan angka 9,00% (persen), kemudian Pulau

Sulawesi senilai 6,87% (persen), selanjutnya disusul oleh Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan angka 2,68% (persen), serta terakhir disusul oleh Pulau Maluku dan Papua memiliki angka 2,46% (persen) (Badan Pusat Statistik, 2022b).



*Gambar 1.1 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB berdasarkan Pulau
(Sumber: Badan Pusat Statistik)*

Berdasarkan gambar serta data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi masih berpusat di Pulau Jawa dari pada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. hal ini menandakan bahwa pemerataan roda ekonomi masih didominasi oleh pulau Jawa. Sehingga dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan sesuai dengan pemerataan segala aspek ke seluruh pelosok Indonesia.

Selain faktor pemerataan perekonomian pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia mampu diidentifikasi di perbagai faktor salah satunya adalah kepadatan penduduk serta laju pertumbuhan urbanisasi yang terletak pada DKI Jakarta. Disebutkan dari data *World City Populations* menepatkan Jakarta sebagai kota penduduk terpadat ke 28 dari 778 kota di Dunia dibawah oleh Kota Bogota Colombia dengan penduduk 11. 507.960 dengan tingkat pertumbuhan 1.44 persen, sedangkan Jakarta sendiri mengalami peningkatan populasi dari 2022 ke 2023 dengan populasi dari 11.142.303 naik ke angka 11.248.839 dengan tingkat pertumbuhan 1.57 persen (World City Populations, 2023). Pertumbuhan populasi tersebut diikuti dengan arus urbanisasi perkotaan seperti kemacetan. Dilansir dari *Tomtom Traffic Indeks 2022* menetapkan Jakarta di urutan 29 setelah bordeaux,

Francis di urutan 28 dari 389 Kota di Dunia, lajur kepadatan traffic di Jakarta disebutkan bahwa jarak per 10 Km dapat ditempuh selama kurun waktu 22 menit 40 detik (Tomtom, 2022). Akibatnya dari kepadatan penduduk dan kemacetan tersebut memiliki dampak pada udara yang tidak sehat, lingkungan dengan tata ruang yang tidak dimobilisasi dengan benar mengakibatkan banyak risiko lainnya yang mengidentifikasi Jakarta sebagai Kota yang rawan dengan bencana alam.

Kajian pemindahan Ibu Kota telah di kaji oleh beberapa penelitian terdahulu misalnya dalam penelitian Muhammad Taufiq (2020) yang berjudul **“Pemindahan Ibu Kota dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi”** menjelaskan bahwa pemerataan ekonomi dengan negara kepulauan merupakan suatu tantangan yang rumit dan kompleks bagi Indonesia. Dengan melihat permasalahan yang ada di Jawa khususnya Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya terjadi over populasi, kemacetan, polusi, minim ketersediaan air bersih dan masalah ekonomi lainnya menjadi sebab perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. selain itu dengan perpindahan IKN di Kalimantan Timur menjadi adanya pusat pertumbuhan nasional baru dengan desain yang berkembang guna untuk menjadi tonggak perekonomian baru selain Jakarta. Alasan perpindahan ibu kota negara guna untuk pemerataan pembangunan dan pemisahan pusat pemerintahan.

Dengan permasalahan latar belakang di atas oleh beberapa negara, penulis menganggap bahwa perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan tujuan mendongkrak perekonomian wilayah bagian Negara dinilai tepat dikarenakan akan berdampak positif bagi lokasi yang dituju melihat ekonomi di Indonesia yang sentralistis di Pulau Jawa. Dampak positif dari pemindahan ibu kota yaitu dapat tercapainya pemerataan ekonomi, seiring dengan pemindahan ekonomi akan berdampak pada konektivitas internal dan eksternal. Internal dalam hal ini yaitu pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh di aspek pembangunan wilayah kepulauan di luar dari pulau Jawa contohnya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Papua sedangkan eksternal sendiri yaitu lebih kepada kerja sama luar negeri antarkawasan di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura ataupun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam (Taufiq, 2020).

Selain itu dari penelitian Deny Slamet Pribadi dan Setiyo Utomo (2021) yang berjudul **“Dampak Perpindahan Ibu Kota Negara Terhadap Pemulihan**

Ekonomi dalam Perspektif Persaingan Usaha” menilai bahwa relokasi Ibu Kota Negara (IKN) adalah suatu hal yang efektif dalam pemerataan ekonomi secara luas. Sentralistis ekonomi yang terjadi di pulau Jawa menyebabkan terjadinya kesenjangan antarwilayah di Indonesia sehingga perpindahan ibu kota merupakan suatu strategi yang baik untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah yang ada di Indonesia. Adapun pokok pembahasan yang dalam penelitian ini yaitu mengkaji faktor yang melatarbelakangi pemindahan IKN dan dampak untuk pemulihan ekonomi yang merata serta kebijakan persaingan usaha di pemindahan IKN seperti tender dalam tahapan pembangunan IKN. Peneliti menemukan bahwa perpindahan ibu kota negara sangat memengaruhi proses tender dalam pengadaan barang dan jasa pada IKN.

Selain itu, perpindahan IKN akan berdampak pada pelaku usaha. Sesuai dengan arahan UU bahwa larangan keras praktik monopoli dan usaha tidak sehat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Inovasi kebijakan yang memperhatikan teknologi akan mempercepat dorongan pertumbuhan ekonomi serta pemulihan ekonomi. Dalam upaya perpindahan IKN diperlukan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menjaga persaingan usaha terutama pada proses tender dikarenakan persaingan tender yang tidak sehat akan berdampak pada pembangunan ibu kota negara serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kajian terhadap tender dan peran KPPU sangat penting untuk mengatur kajian tender agar berdampak pada pemulihan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia (Pribadi & Utomo, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dijelaskan bahwa kajian-kajian terdahulu masih kurang menjelaskan secara spesifik tentang pembangunan berkelanjutan, terutama dari aspek sosial dan lingkungan. Padahal dalam teori pembangunan berkelanjutan tiga komponen tersebut saling berkaitan dan saling beririsan. Menurut Perdana Menteri Norwegia, Gro Harlem Brundtland pembangunan yang menghiraukan salah satu pilar dari ketiga tersebut akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan ekonomi saja dan menghiraukan aspek lainnya yang tidak kalah penting yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan. Oleh karena itu berdasarkan kelemahan kajian sebelumnya tentang pembangunan IKN, kajian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam mengenai

pembangunan IKN dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan ini memiliki rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pembangunan berkelanjutan lingkungan pada perencanaan pemindahan Ibu Kota Nusantara?
2. Apa saja dampak pemindahan Ibu Kota Nusantara pada aspek lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui pembangunan IKN dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
2. untuk mengetahui dampak perencanaan Ibu Kota Nusantara pada aspek pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atas perkembangan bagi keilmuan dalam hal pembentukan kebijakan mengenai pemindahan Ibu kota Negara dan aspek-aspek yang akan berpengaruh dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk melihat dampak Ibu Kota Negara “Nusantara” terhadap pembangunan keberlanjutan dilihat dari sisi perencanaan serta memberikan kontribusi pada pembangunan IKN ke depannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk melihat prioritas pembangunan kebijakan mengenai pemindahan Ibukota Negara, lalu untuk mengetahui hal yang sedang ramai dibicarakan mengenai kebijakan Pemindahan Ibukota Negara (IKN) terhadap potensi pembangunan keberlanjutan.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah hal yang sangat serius, di samping sebagai pemberi informasi mengenai tentang kejelasan dan arah bagi jalannya kajian penelitian, juga dapat memberikan batasan-batasan pengertian pada istilah-istilah yang ada di dalam riset ini (Azwar, 2007). Definisi konseptual merupakan suatu pengertian yang menjadi acuan konsep dan maknanya dari penelitian namun definisi konseptual bersifat masih sangat abstrak walaupun secara intuitif dapat dipahami maksudnya. Dalam menemukan batasan yang lebih jelas daripada masing-masing konsep yang akan digunakan, maka penulis menggunakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan.

Konsep adalah istilah yang berdasarkan dari satu kata atau lebih yang dapat menunjukkan suatu gejala atau pernyataan suatu ide (gagasan) tertentu. Persepsi (*mental image*) atau abstraksi yang dibentuk melalui dengan membuat narasi hal-hal penting pada suatu penelitian serta tentunya memiliki konsep dasar yang bertujuan untuk memberikan batasan-batasan yang terkait dalam konsep dasar pada penelitian ini (Hasan, 2018).

1.5.1 Pembangunan

Pembangunan pada awalnya dikenalkan melalui istilah di bidang perekonomian, tetapi seiring dengan perkembangan pemikiran, teori dari pembangunan sendiri tidak cuman didapat dikerucutkan dalam bidang ekonomi saja melainkan pembangunan kini menjadi konsep yang dinamis serta bersifat multidimensional, dalam hal ini pembangunan dapat menjadi acuan berbagai aspek kehidupan perkembangan zaman misalnya pada aspek politik, sosial budaya dan lingkungan. secara bahasa pembangunan sering diistilahkan pengembangan, modernisasi, peningkatan ekonomi dan perubahan politik. Menurut Siagian (2001) pembangunan merupakan proses dalam mengupayakan pertumbuhan dan perubahan yang direncanakan oleh Negara menuju modernitas untuk pembinaan bangsa. Sejalan dengan itu, Todaro (1995) dalam mengupayakan pembangunan yang baik demi pembinaan negara ia mendefinisikan bahwa pembangunan harus memiliki tiga target fokus utama yaitu pertama, peningkatan infrastruktur terhadap akses bahan pokok; kedua, Pengembangan SDM serta lapangan kerja; dan yang

ketiga yaitu, peningkatan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Afandi, Syed Agung. Afandi, Muslim. Erdayani, 2022).

Secara terminologi, pembangunan dieratkan dengan istilah *development*, *modernization*, *empowerin*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, serta *polical change*. Dengan eratan kaitan dengan istilah di atas menjadikan definisi pembangunan memiliki makna yang *multiinterpretable*. Indikator inti dalam pembangunan berdasarkan definisi Siagian (2001) menjelaskan memiliki pengertian yaitu pertama, pembangunan adalah sebuah tahapan yang tidak memiliki akhir; kedua, pembangunan ialah sebuah kegiatan yang dilatarbelakangi oleh kesadaran untuk dilaksanakan secara konsisten; ketiga, pembangunan dilaksanakan terencana yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perubahan; keempat pembangunan diorientasikan untuk sebagai modernisasi; kelima proses modernisasi yang ditujukan berdasarkan pembangunan memiliki sifat *multidimensional*; dan keenam, tahapan dan aktivitas pembangunan berorientasi ke kegiatan untuk pembinaan bangsa yang ditujukan mencapai *goals* bangsa dan negara yang telah ditetapkan.

1.5.1.1 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan artikan sebagai: “*Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini dengan tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi di masa yang akan datang*”, sesuai dengan ketetapan dari laporan Brutland pada tahun 1987 (UNESCO, 2011, p. 1). Dari definisi di atas, mendasarkan bahwa pembangunan berorientasi pada perkembangan dan peningkatan kualitas hidup untuk semua manusia, baik pada masa kini dan masa mendatang. Dasar pembangunan berkelanjutan dispesifikkan pada tiga indikitaor, di mana pembangunan mewajibkan untuk kesejahteraan secara bidang ekonomi, adil secara sosial, serta *sustainable* (berkelanjutan) secara lingkungan. Dengan melakukan elaborasi tiga indikator di atas, oleh karena itu pendekatan pembangunan berkelanjutan ialah pendekatan yang bersifat *holistik* (menyeluruh) (Widjajanti, Darwina Matakupan, Stien j, Didha, Robert J, Martan, Dwi, & Hidayat, 2014).

Konsep pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal sustainable development adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lain sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. "Lingkungan" adalah tempat kita semua hidup, sedangkan "pembangunan" adalah apa kita semua lakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan nasib manusia (Warlina, 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lebih detail lagi. Sebagai contoh adalah prinsip berkelanjutan yang diambillkan dari Robinson dkk. (1990) dalam Mitchell (2000) sebagai berikut.

1. Prinsip lingkungan/ekologi:
 - a. Melindungi sistem penunjang kehidupan
 - b. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik
 - c. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta mengembangkan dan menetapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang sangat rusak
 - d. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global

1.5.2 Perencanaan

Perencanaan sejatinya berprinsip langkah persiapan untuk memulai suatu hal. Ada beberapa definisi perencanaan yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain yaitu (Debby Prayudha, 2019): (1) *Bintoro Tjokroaminoto*, perencanaan merupakan tahapan dalam melakukan persiapan aktivitas secara sistematis yang ditujukan untuk menggapai sebuah tujuan tertentu; (2) *Prajudi Atmosudirjo*, perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan mengenai hal yang akan dilakukan pada masa mendatang yang bertujuan untuk mencapai suatu hal tujuan

tertentu, siapa aktor yang menjalankan, bilamana, di mana serta upaya strategi bagaimana dalam menjalankannya; (3) *Handoko*, perencanaan yaitu meliputi: (a) tahapan pemilihan atau penetapan arah atau cita-cita organisasi; serta (b) tahapan penentuan cara strategi, kebijakan, proyek, program, sistematika, metode, sistem, anggaran serta standar yang diperlukan pada pencapaian *goals* (cita-cita atau tujuan); (4) *Husaini Usman*, perencanaan merupakan aktivitas yang akan dilakukan pada masa mendatang dimaksudkan sebagai pencapaian tujuan; (5) Harold Koontz dan Cyril O. Donell dalam bukunya *Principle of Management* memberikan definisi perencanaan sebagai "*Persiapan yang teratur dari setiap usaha yang mewujudkan/mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan*" (Dr. Hj. Nina Winangsih Syam, 2014).

1.5.3. Ibu Kota Nusantara

Pemindahan ibu kota dituangkan dalam UU RI Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Visi Ibu Kota Nusantara tertuang pada Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2022 mengenai "*Ibu Kota Negara Nusantara*" pada pasal 2 yaitu sebagai berikut:

Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia yang bertujuan:

- a) Menjadi kota berkelanjutan di dunia,*
- b) Sebagai pendorong ekonomi Indonesia pada masa mendatang,*
- c) Sebagai identitas nasional yang mewakili keberagaman bangsa Indonesia , berdasarkan amanat Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022).*

Undang-undang ini menetapkan wilayah baru sebagai Ibu Kota Negara dan secara langsung memindahkan beberapa bagian dari jajaran pemerintahan sekaligus menjadi tempat menyelenggarakan urusan pemerintah tingkat pusat, yang mengacu pada:

- a. Pembangunan dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara berpedoman pada visi Ibu Kota Negara sebagai kota metropolitan dunia untuk semua orang, dengan tujuan akhir mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi rujukan (role model) bagi pengembangan dan pengelolaan kota-kota di Indonesia.

dan di seluruh dunia. Visi besar tersebut bermaksud mewujudkan ibu kota nusantara sebagai:

1. Kota-kota berkelanjutan di dunia, yang menawarkan kenyamanan, keselarasan dengan lingkungan, dan ketahanan melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan karbon minimal
2. mendorong perekonomian Indonesia di masa depan, yang memberikan peluang ekonomi bagi semua orang melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; Dan
3. Tanda jati diri bangsa yang melambangkan perdamaian di tengah keberagaman, menurut Bhinneka Tunggal Ika.

Ibukota Kepulauan menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

1. Identitas nasional: pusat kegiatan yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, keagungan bangsa, karakter sosial serta persatuan. IKN melambangkan kepribadian dan kemajemukan NKRI, yang mewujudkan prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. *Smart, green dan sustainability* adalah sebuah kota yang menawarkan pengelolaan sumber daya yang efektif, informasi yang tepat dan jelas, serta layanan terbaik kepada warganya. Hal ini dicapai dengan mengembangkan modal transportasi terpadu, mengolah sampah, menggunakan sumber daya air dan energi secara efisien, mengelola kegiatan sosial budaya dan ekonomi kota secara seimbang, merencanakan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan, dan membina kerjasama yang lebih besar. antara alam dan buatan manusia.
3. Kota berstandar internasional: dengan kriteria kota yang mampu bersifat inovatif, efisiensi dalam hal tata kelola kota, mampu mengimplementasikan IPTEK, terintegrasi dan sifat dasar kota berstandar internasional lainnya.
4. Pemerintahan pusat yang menjalankan pemerintahan secara *smart*, tidak terpaku pada sistem birokrasi yang terlalu kaku, profesional, serta mampu memaksimalkan kemampuan serta potensi pegawai ASN.

5. Menjadi kebaruaran dari perekonomian yang memperkuat rantai nilai internasional dan menciptakan bisnis yang kompetitif, berteknologi tinggi, bersih, dan bernilai tinggi di wilayah timur Indonesia untuk memajukan kesetaraan ekonomi.
6. Kota yang sehat, dimana seluruh warganya – baik laki-laki maupun perempuan merasa aman dan nyaman, dimana masyarakat rentan seperti bayi, balita, anak-anak, dan lainnya dilindungi, dan apabila fasilitas sosial dan umum tersedia untuk mendukung kebutuhan dan aktivitas seluruh anggota masyarakat dan keluarga.

1.6 Definisi Operasional

Pembangunan Sejatinya merupakan perbaikan dari suatu daerah atau wilayah untuk menggapai tujuan tertentu. Arah jalannya negara bergantung pada kebijakan pemerintah terhadap pembangunan yang didahulukan. Perubahan dalam pola pembangunan yang berpusat menjadikan salah satu faktor terjadinya kesenjangan, kualitas SDM dan berbagai hal lainnya. Oleh karena itu pembangunan keberlanjutan adalah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menggapai hal tersebut, pilar-pilar seperti pembangunan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan harus dikembangkan secara berkesinambungan satu sama lain (Suparmoko, 2020). Sehingga kebijakan pembangunan diharapkan tepat dalam menentukan ukuran serta sasaran.

Definisi operasional dapat diartikan sebagai suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang diamati oleh peneliti. Berikut definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Gambaran umum Ibu Kota Nusantara
2. Identifikasi perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara dalam pembangunan berkelanjutan pada keberlangsungan lingkungan melalui:
 - a. Pemeliharaan Sumber Daya Alam/lingkungan di Ibu Kota Nusantara
 - b. Perlindungan Sistem Penunjang Kehidupan Penduduk Lokal di Ibu Kota Nusantara
 - c. Perlindungan keanekaragaman hayati di IKN;
 - d. Mitigasi ancaman perubahan lingkungan global

3. Pengalaman Malaysia dalam pemindahan Ibu Kota Nusantara

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan proses yang dilaksanakan oleh peneliti yang bertujuan untuk menggabungkan informasi atau data dan melaksanakan pendalaman terakit data yang diperoleh. Metode penelitian menyampaikan penjelasan mengenai rencana penelitian yang mencakup yaitu: sistematika dan tahapan yang perlu dilaksanakan, durasi penelitian, basis data, serta strategi tahapan mengenai data-data yang didapatkan yang kemudian dilakukan untuk mengelah dan menganalisis. Sedangkan menurut Sugiyono (Anggito, 2018), mendefinisikan metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapati data yang bertujuan untuk pemanfaatan tertentu. Ilmiah memiliki arti sebagai aktivitas penelitian yang berdasarkan dengan karakteristik akademik yaitu bersifat *rasional, empiris, dan terstruktur sesuai dengan kaidah keilmuan*.

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena terhadap subjek penelitian dengan cara deskriptif terhadap suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Media Kita,2005 dalam (Nurasipia Harahap, M.Hum, 2020). Sedangkan menurut Mestika Zed dalam risetnya bahwa pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur merupakan kegiatan yang berkenaan dalam melakukan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2014). Adapun peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur metode pengumpulan data.

1.7.2 Jenis data

Pada penyusunan kajian ini nantinya akan bertumpu pada dua jenis data literatur yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer dapat diperoleh dari dokumen resmi dari pemerintah mengenai IKN, dalam hal ini dokumen yang bersifat Undang-undang (UU), Peraturan Presiden (Perpres),

dan dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya data sekunder adalah data yang digabungkan oleh penulis yang berdasarkan dari baik dari jurnal, buku-buku serta penelitian-penelitian yang lalu yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

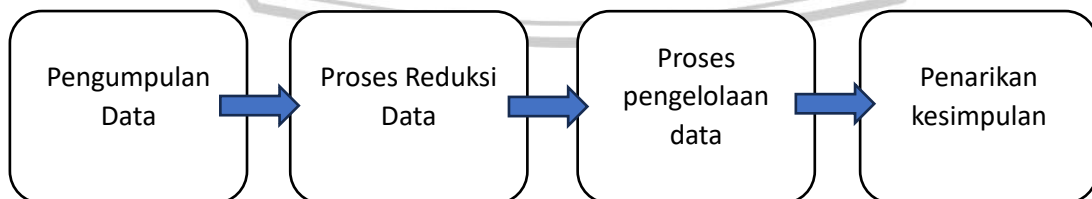
Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pelbagai metode, adapun metode yang dilakukan yaitu berdasarkan metode dokumentasi yang melalui penggabungan data atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Pengumpulan data melalui dokumentasi berbasis dari media internet, buku, jurnal dan/atau dokumen lainnya yang memiliki korelasi dengan fokus kajian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Proses Analisa data merupakan tahapan yang penting mengenai bagaimana sebuah data dan informasi dilakukan penganalisisan dan penjabaran berdasarkan tujuan penelitian. Sesuai dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan tipe/jenis penelitian deskriptif model Analisa data yang akan dilaksanakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan definisi mengenai analisis data kualitatif dari pelbagai ahli yaitu menurut:

Bondan dan Bikle mengartikan analisis data kualitatif berikut: *“sebagai upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja dari sumber data, mengorganisasikan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mengisikannya, mencari dan menemukan pola, menyaring hal yang dinilai penting dan apa yang dipelajari, serta menetapkan apa yang dapat dideskriptifkan pada publik atau orang lain”*.

Penelitian ini menggunakan tahapan analisis data sebagai berikut:



1. Pengumpulan data, bertujuan untuk melaksanakan penggabungan atau pengumpulan data yang memiliki korelasi dengan permasalahan penelitian; kedua,

2. Proses reduksi data yaitu bertujuan untuk pemilihan data yang relevan dengan kategori fokus rumusan penelitian;
3. Proses pengolahan data, yaitu berisi mengenai tentang pola arus deskripsi dari fenomena atau data yang didapat untuk mencari korelasi antara satu dengan hal lainnya yang melakukan proses yang rasional;
4. Penarikan kesimpulan, tahapan ini bertujuan untuk menemukan hasil dan tujuan dari penelitian yang berdasarkan basis data dan informasi yang telah diperoleh, pada tahapan ini juga berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dari penelitian.

